

LAMPUNG PARLIAMENT WATCH (LPW)

POLA MONEY POLITICS

# KONTROVERSI PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG

Editor :  
Nanang Trenggono  
Syarief Makhyah

PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG 2003



## PENGANTAR

sub nebulosa etiamque etiam etiam  
isagidae etiamque etiam etiam etiam  
etiam etiam etiam etiam etiam etiam etiam

Secara umum, tujuan diterbitkan buku ini adalah ingin menggambarkan pola *money politics* yang terjadi dalam proses pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008. Peristiwa politik tertinggi yang pertama sejak gerakan reformasi menjatuhkan rezim otoritarian militeristik Orde Baru. Secara khusus, buku ini lebih diarahkan untuk mengungkapkan berbagai pola permainan politik uang yang melibatkan aktor-aktor politik, antara lain para kandidat gubernur, anggota DPRD, pengurus partai politik dan berbagai pihak yang berperan aktif dalam pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini ditunjukkan pula pemikiran, cara, forum, dan instrumen yang digunakan untuk melakukan *money politics*.

Latar belakang para penulisnya beranekaragam, antara lain akademisi, pengacara, aktivis dan jurnalis profesional. Oleh sebab itu, kumpulan karangan ini memiliki karakter sendiri-sendiri, baik isi maupun gaya penulisan. Bila dicermati secara keseluruhan berbagai perspektif tertuang dalam buku ini, yakni pendekatan hukum, ekonomi politik, struktural fungsional, etika, dan analogi. Meskipun dalam tulisan masing-masing kesemuanya dituangkan secara ringkas.

Sama dengan ciri bunga rampai pada umumnya, dari satu tulisan ke tulisan lain bisa saja terjadi pengulangan-pengulangan. Meskipun demikian, kumpulan karangan ini disistematisasi sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk mengambil kesimpulan. Secara keseluruhan kerangka buku ini dibagi dalam enam bagian termasuk kesimpulan.

Pertama, tiga penulis langsung berbicara tentang perilaku korup, yakni permainan *money politics* yang terjadi pada semua tahapan pemilihan gubernur. Kedua, dua penulis menampilkan praktik politik uang dari ekspose media massa khususnya media cetak, yang disertai *content analysis* terhadap neutralitas media harian utama di Lampung dalam mensikapi sukses. Ketiga, menguraikan tentang keterbatasan dan kelemahan hukum untuk menjerat *money politics* yang secara formal dikategorikan sebagai tindak pidana suap. Disertai pula dengan solusi alternatif dan pilihan hukum untuk mengantisipasi praktik *money politics*. Keempat, satu tulisan mengupas khusus mengenai prediksi

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
**POLARISATION POLITICAL  
KONTROVERSI PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2003-2008**  
**Nanang Trenggono dan Syarief Makhyu**  
**Pola money Politics**  
**Kontroversi Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008**  
**Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2003**  
**xiv, 203 halaman 14,5 x 21 cm**

bergulungan. Bisa juga  
dengan cara

**ISBN 979-8287-48-7**

**LAMPUUNG BAGIAN DALAM  
HOTAWATI MARYAMAH**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Penulis**

**Penerbit Universitas Lampung  
Cetakan Pertama: Februari 2003**

**Bersamaan dengan  
Bersamaan dengan  
Bersamaan dengan  
Bersamaan dengan  
Bersamaan dengan**

## PENGANTAR

Secara umum, tulisan diterbitkan buku ini adalah ingin memperbaikkan pola *money politics* yang terjadi dalam proses kontroverSI PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2003-2008. Tujuan penulis dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana berjalannya pemilihan gubernur pada tahun 2003, yakni pemilihan yang dianggap tidak adil dan tidak benar.

Lalu, siapa yang mengambil keuntungan, antara lain akademisi, pengusaha, dan politikus?

Bambang Eka Wijaya, antara lain sebab itu, komplikasi karang semakin bertambah sendiri, baik itu maupun pihak ketiga lainnya. Buktinya, secara keseluruhan berbagai permasalahan yang terjadi pada pendekatan hukum dalam pemilihan gubernur pada tahun 2003-2008.

## LAMPUNG PARLIAMENT WATCH (LPW)

Sama dengan tiga bunga ramai pada pemilihan gubernur lainnya, ada tiga bunga ramai pada pemilihan gubernur di Lampung. Dua di antaranya merupakan hasil kerja sama antara dua pihak yang berbeda, yakni Nanang Trenggono dan Syarief Makhyah. Ketiga bunga ramai ini termasuk dalam kategori yang sama, yakni korupsi, yang berbicara tentang pertikaian korupsi, yakni permainan *money politics* yang terjadi sebelum tahapan pemilihan gubernur. Kedua, dua pemimpin meraih milikan, yakni politik yang dari ekspos media massa, kebunyia media cetak, yang diambil content atau susterhang niatitas media massa.

Pertama, yang diambil media cetak, yakni *Money Politics in Lampung Governor Election 2003-2008*, yang ditulis oleh Bambang Eka Wijaya. Kedua, yang ditulis oleh Nanang Trenggono dan Syarief Makhyah, yakni *Money Politics in Lampung Governor Election 2003-2008*. Ketiga, yang ditulis oleh Bambang Eka Wijaya, yakni *Money Politics in Lampung Governor Election 2003-2008*.

*Pola Money Politics Kontroversi Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008*

11. Realitas Money Politics dalam Retorika Transisi Politik Demokratisasi, <i>Nanang Trenggono</i> .....	145
<b>V. TERROR DALAM SUKSESI</b>	
12. "Drama Suksesi Nan Tak Kunjung Akhir," <i>Oyos Saroso H.N.</i> .....	167
<b>VI. KESIMPULAN</b>	
13. Kesimpulan ..... Foto: <i>Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung</i> .....	187
<b>LAMPIRAN</b>	
14. Panduan Pemantauan Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	195
15. Proses Pemilihan Gubernur Dalam Photo .....	205
<b>III. MONEY POLITICS DAN KELERASAGAN</b>	
1. Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	21
2. Belakangan Waktu dan Bantuan Politik Dari Pengusaha Kecelakaan Dalam Perjalanan	24
3. Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	26
4. Belakangan Waktu dan Bantuan Politik Dari Pengusaha Kecelakaan Dalam Perjalanan	29
5. Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	32
6. Belakangan Waktu dan Bantuan Politik Dari Pengusaha Kecelakaan Dalam Perjalanan	35
7. Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	38
8. Belakangan Waktu dan Bantuan Politik Dari Pengusaha Kecelakaan Dalam Perjalanan	41
9. Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	44
10. Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	47
11. Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	50
12. Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	53
13. Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	56
<b>VI. MONEY POLITICS DALAM DEMOKRATISASI</b>	
9. Belakangan Waktu dan Bantuan Politik Dari Pengusaha Kecelakaan Dalam Perjalanan	59
10. Money Politics dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2003-2008 .....	62

Setelah penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, proses sukses kepala daerah selalu disertai dengan aroma *money politics*. Hanya semua orang yakni bahwa *money politics* telah terjadi secara terang benderang dalam setiap tahapan proses sukses, namun sangat sulit untuk dieksplikan. Dari sekian puluh sukces kepala daerah di Indonesia hanya Maluku Utara saja yang calon gubernur terpilih gagal diambil. Sedangkan Sulawesi Tenggara calon gubernur terpilih tetapi diambil sejumlah anggota DPRDnya setelah terpilih karena kasus *money politics*.

## I POLA MONEY POLITICS DALAM SUKSESSI

Setelah penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, proses sukses kepala daerah selalu disertai dengan aroma *money politics*. Hanya semua orang yakni bahwa *money politics* telah terjadi secara terang benderang dalam setiap tahapan proses sukses, namun sangat sulit untuk dieksplikan. Dari sekian puluh sukces kepala daerah di Indonesia hanya Maluku Utara saja yang calon gubernur terpilih gagal diambil. Sedangkan Sulawesi Tenggara calon gubernur terpilih tetapi diambil sejumlah anggota DPRDnya setelah terpilih karena kasus *money politics*.

Berdasarkan data dari Sekretariat Badan Pemerintahan dan Keuangan Universitas Lampung dan Koordinator Badan Pemerintahan dan Keuangan (LPPM),

sepenuhnya kepada Allah SWT. Untuk mewujudkan kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang halal itu, maka perlu ditinjau ulang tentang pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan, pola rekruitmen calon, dan aturan main pemilihan. Sistem pemilihan langsung sekarang sudah menjadi wacana sebagai alternatif yang paling baik untuk melakukan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Dengan cara ini, kemungkinan terjadinya politik uang dapat diminimalkan, sekaligus menunjukkan siapa yang sebenarnya dikehendaki rakyat. Pola rekruitmen calon yang terbuka, memberikan kesan bahwa calon-calon yang memiliki kepentingan untuk memperoleh dukungan politik dari fraksi-fraksi di DPRD. Pola ini kemudian dimanfaatkan oleh anggota DPRD untuk melakukan praktik *money politics*. Rekrutmen calon seharusnya dilakukan oleh partai. Partailah yang memiliki dan menentukan calon, untuk kemudian disosialisasikan kepada publik. Kalau partai yang memiliki kepentingan untuk mencari calon, maka sangat kecil kemungkinan terjadinya praktik *money politics*.

Aturan main pemilihan atau tatacara pemilihan seharusnya tidak dimonopoli oleh DPRD. Dewan seharusnya memberikan ruang yang terbuka bagi publik untuk memberikan kritik, saran dan masukan-masukan dalam pembuatan tatacara pemilihan. Jika tatacara dimonopoli pembuatannya, maka yang terjadi tatacara satar dengan kepentingan-kepentingan politik fraksi-fraksi di DPRD.

#### DAFTAR BACAAN:

- Diskusi Panel, "Membangun Pondasi Good Governance Di Masa Transisi". 26 Januari 2000. *The Indonesian Society for Transparency*. Financial Club Jakarta.  
Makhyra, Syarief. "PDIP dan Bias Kekuasaan". Cataran Tambahan atas Tulisan Eddy Rifai dan Wahyu Sasongko. *Lampung Post*. 27 Desember 2003.  
Widagdo, Badioeri. "Menilai Pemimpin Kita". *Republika*. Jumat 22 Oktober 1999.

“Suara hati, suara hati, kenapa pergi” (Iwan Fals)

## REALITAS MONEY POLITICS DALAM RETORIKA TRANSISI POLITIK DEMOKRATISASI

Oleh: Namang Trenggono

Dinamika politik pascakejatuhan Presiden Soeharto 21 Mei 1998 diwarnai oleh kompleksitas demokratisasi. Dalam hal ini adalah transformasi dari politik otoritarian militeristik Orde Baru (Orba) menuju demokratisasi politik, yang ditengah krisis ekonomi, telah memunculkan dua istilah yakni: reformasi dan transisi demokratisasi. Dua istilah ini tidak bebas nilai dan mempunyai konotasi yang berbeda. Istilah reformasi sering dipakai untuk menunjukkan semangat perubahan yang “revolutioner” menuju tatanan baru yang konstruktif. Penggunaan istilah reformasi sering kali diletekkan dalam konteks dan anggapan yang membekukan antara masa Orba yang diktator, suram, otoriter, tertutup, militeristik dan keburukan-keburukan lainnya dengan kondisi baru yang diinginkan serta dibayangkan bersifat demokratis, emanisipatif dan terbuka.

Sedangkan istilah transisi demokratisasi, sering digunakan pada saat wacana reformasi menghadapi problem serius, menemui kendala yang menyulitkan gerakan reformasi itu sendiri. Seperti perlaku buruk elite partai politik baik yang ada di lembaga legislatif maupun yang menjadi pengurus partai politik, serta birokrasi yang masih korup ibarat kerajangan sampah. Untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang berjalan bersamaan dengan proses reformasi politik di segala bidang, sering kali digunakan istilah atau retorika—apologis—transisi politik demokratisasi. Namun, dalam kalimat ini tetap konsisten

<sup>1</sup> Penulis adalah Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Peserta Program Doktor Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, dan Aktivis LPW.